

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemakmuran berbagai negara sangat bervariasi. Ada negara maju dan berkembang. Dikutip dari Worldometers, ada 36 negara berada pada kategori negara maju, sedangkan 159 dari 195 negara di dunia yang diakui PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) berada pada kategori negara berkembang. Berdasarkan analisis yang dilakukan PBB pada 159 negara berkembang di dunia menyebutkan bahwa sejak bulan Maret hingga Mei 2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin mencapai 71 juta orang. Selain itu, permasalahan mengenai krisis hak asasi manusia, kesetaraan gender, permukiman kumuh, perubahan iklim, degradasi lingkungan, kepunahan flora dan fauna merupakan permasalahan global yang dihadapi saat ini.

Untuk mengurangi ketimpangan antar negara dan meningkatkan kualitas kehidupan, pada tahun 2015 PBB mengadopsi dokumen yang berjudul “*Transforming our world : The 2030 Agenda for Sustainable Developments*” atau disebut SDGs (*Sustainability Development Goals*) sebagai agenda global hingga 2030 mendatang. Indonesia merupakan anggota PBB yang berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan telah menyelaraskan tujuan pembangunan nasional dengan SDGs. Rencana Aksi Nasional (RAN) merupakan rencana kerja pembangunan komprehensif dan terpadu yang disusun secara rinci, inklusif, akuntabel, transparan, terukur yang melibatkan pemerintah serta swasta

guna tercapainya SDGs. Keterlibatan swasta menjadi factor kunci keberhasilan tujuan pembangunan nasional. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat saling mengambil peran dalam upaya pencapaian SDGs.

Pada umumnya perusahaan hanya berorientasi pada manfaat ekonomi saja yang dinamakan konsep *single bottom line* (mengutamakan profit). SDGs mengembangkan konsep *triple bottom line*. Berdasarkan konsep tersebut, aspek ekonomi tidak lagi menjadi unsur utama dalam usaha. Namun, aspek sosial serta lingkungan penting bagi perusahaan sebagai katrol dalam mencapai keberlanjutan usaha. Pada dasarnya, keberadaan suatu perusahaan baik besar maupun kecil akan membawa perubahan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat sekitarnya (Nawawi dkk., 2015). Tuntutan sosial muncul sebagai refleksi pertanggung jawaban perusahaan terhadap *stakeholders* yang meliputi karyawan, pembeli, investor, pemerintah, masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi penerus.

Menurut Rahayu (2019), keadaan mengenai kesadaran masyarakat yang tidak hanya mementingkan produk yang dihasilkan saja, tetapi juga tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan perusahaan, mendorong akuntansi untuk mengembangkan pandangannya mengenai usaha. Maka, akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan muncul sebagai respon atas keadaan tersebut. Dalam praktiknya, akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan akan dituangkan dalam sebuah laporan yang disebut laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Konsep laporan keberlanjutan muncul sebagai sarana bagi perusahaan guna mencapai *sustainability development* dengan sebuah kerangka global yang mudah dipahami (Suryono dan Prastiwi, 2011). Meskipun laporan ini masih bersifat sukarela, tetapi sudah banyak perusahaan secara terbuka menerbitkan laporan keberlanjutan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Pada 2019, Harvard business review menerbitkan sebuah artikel berjudul “*The Investor Revolution*” yang menyebutkan bahwa investor saat ini mulai mencoba memitigasi resiko yang ada dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi dari perusahaan yang mengelola asset atau investasi mereka, sehingga mau tidak mau perusahaan harus menunjukkan kinerja keberlanjutan usahanya.

Laporan keberlanjutan didasari oleh *legitimacy theory* yang menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Mazelfi, 2018). *Stakeholders theory* juga menjadi dasar penyusunan laporan keberlanjutan, teori ini menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban dalam pemenuhan informasi kepada para pemangku kepentingan terkait keselamatan, kesejahteraan serta keamanan sosial, lingkungan tempat perusahaan berada (Rofelawaty, 2014).

Laporan keberlanjutan wajib disusun oleh perusahaan yang sudah *go public* seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk. Hal tersebut dijelaskan dalam POJK No. 51 Tahun 2017

pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten serta perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan.

Pada tahun 1997 bertempat di Boston, Amerika Serikat didirikan sebuah lembaga independen dengan anggota multiprofesional yang meliputi pengusaha, akuntan, organisasi lingkungan hidup, investor, organisasi buruh dan organisasi HAM dari berbagai negara. Lembaga tersebut adalah *Global Reporting Initiative* yang lebih dikenal dengan singkatan GRI. Dilatar belakangi adanya tujuan aspirasional mengenai pembangunan berkelanjutan oleh komisi dunia yaitu PBB, maka GRI menyusun sebuah standar penyusunan laporan keberlanjutan untuk mengetahui praktik pelaporan yang transparan mengenai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari kegiatan organisasi atau perusahaan baik bersifat positif maupun negatif dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Sejak awal kemunculannya, standar GRI sebagai standar pengungkapan laporan keberlanjutan mengalami perkembangan dari mulai tahun 2000, 2002, 2006, 2011 dan 2013 yang secara berturut-turut standar GRI dari generasi tersebut dikenal dengan G1, G2, G3, G3.1 dan G4. Tahun 2016, GRI menerbitkan generasi terbarunya yaitu standar GRI 2016 yang efektif berlaku sejak 1 Juli 2018 (Panjaitan dan Sukoharsono, 2019).

Kartawijaya (2010) berpendapat bahwa standar GRI merupakan pedoman komprehensif yang andal karena sudah dipublikasi secara global serta dilengkapi struktur laporan yang dapat mewakili kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Sukoharsono, standar GRI sebagai pedoman pelaporan keberlanjutan telah diterapkan lebih dari 1000 perusahaan didunia baik swasta maupun

pemerintah (Rahayu, 2019). Gunawan dkk., (2015: 8), mengungkapkan kemunculan berbagai standar khususnya standar GRI membuat kualitas pelaporan mengalami pergeseran dari banyaknya informasi yang dilaporkan menjadi relevansi informasi yang disajikan.

SDGs menjadi dasar pemikiran dan tujuan semua pihak didunia. *National Center for Sustainability Report* (NCSR) adalah organisasi independen pertama yang mengembangkan dan memperkenalkan laporan keberlanjutan di Indonesia. NCSR menganggap laporan keberlanjutan mampu menggambarkan kontribusi suatu organisasi dalam mencapai SDGs. Menurut NCSR, jumlah perusahaan di Indonesia yang melaporkan laporan keberlanjutan semakin meningkat. Namun, peningkatan jumlah perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan tidak diikuti dengan meningkatnya pencapaian SDGs.

Tabel 1. 1

Capaian Target SDGs Tahun 2018/2019 dengan Target RAN 2019

Tujuan	Realisasi Tahun 2018/2019	Target RAN 2019
1	9,41%	7-8%
2	17,80%	17,00%
3	82,70%	85,00%
4	95,66%	96,10%
5	10,60%	9,91%
6	69,27%	85,00%
7	98,30%	96,61%
8	43,16%	51,00%
9	4,27%	5,70%
10	0,389	0,360
16	3,70	4,00
17	66,55%	71,12%

(Sumber: BPS, Indikator TPB Indonesia 2019)

Tabel diatas menunjukkan keberhasilan SDGs tujuan ke tujuh yaitu energy bersih dan terbarukan telah mencapai 98,30% melampaui target RAN yang ditetapkan sebesar 96,61%. Sementara itu, tujuan lainnya seperti SDGs target pertama, yaitu tanpa kemiskinan capaian sebesar 9,41% sedangkan target RAN 2019 yang ditetapkan sebesar 7-8%. Hal ini berarti target pertama tidak tercapai.

Sejak tahun 2005, NCSR mengadakan acara penghargaan *Sustainability Reporting Award (SRA)*. Kegiatan ini merupakan apresiasi dan motivasi bagi perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan guna tercapainya SDGs yang ditargetkan. Penghargaan tersebut tidak mengkritik kinerja, melainkan kepatuhan pelaporan yang berpedoman standar GRI. Pada 2018, sistem penghargaan dari pemenang (*winner*) diubah menjadi pemeringkatan (*Rating*) di ikuti perubahan nama kegiatan menjadi *ASRR (Asia Sustainability Reporting Rating)*. Rating yang digunakan terbagi kedalam kategori platinum, *gold*, *silver* dan *bronze*.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) merupakan perusahaan nasional Indonesia yang memiliki peran besar dalam pemenuhan kebutuhan gas bumi. Gas bumi sebagai produk utama PGN merupakan sumber daya alam yang memerlukan waktu lama untuk diperbaharui. Pemanfaatan gas bumi berskala besar akan menyebabkan perubahan iklim yang merupakan salah satu masalah utama dalam tercapainya SDGs. Menyadari hal tersebut, PGN berupaya meminimalisir dampak yang timbul dari kegiatan operasinya. Untuk mencapai visi menjadi perusahaan kelas dunia bidang gas, penyusunan laporan keberlanjutan dilakukan dengan sangat baik oleh PGN. Ini dibuktikan dengan terpilihnya PGN sebagai *Best*

Overall Sustainability Report di sektor energi sejak 2013 hingga 2017 pada SRA. Sedangkan di ASRR 2018 sampai dengan 2020, PGN memperoleh rating dengan kategori *platinum*.

Industri perbankan berperan penting dalam tercapainya SDGs, dengan adanya *green financing* dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan atau ketimpangan dalam masyarakat secara berkelanjutan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merupakan salah satu bank milik pemerintah dengan jaringan terluas di Indonesia. BRI melakukan upaya kesenjangan dengan memastikan semua aktivitas ekonomi di seluruh wilayah diberikan kemudahan akses untuk jasa keuangan. Kontribusi BRI dalam tercapainya SDGs disusunnya laporan keberlanjutan yang diikutkan dalam kegiatan ASRR pada 2018 hingga memperoleh kategori silver. Ditahun berikutnya, BRI menunjukkan keseriusannya dalam menyusun laporan keberlanjutan hingga tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut memperoleh kategori *gold*.

PT Astra International Tbk merupakan perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak disektor industry dengan produk otomotif sebagai hasil kegiatan operasinya. Dampak yang paling dirasakan adalah rusaknya air, tanah dan udara. Banyak permasalahan yang menjadi fokus SDGs bersumber dari sector industry seperti ketersediaan air bersih, produksi berkelanjutan serta lingkungan aman dan berkelanjutan. Dampak ini juga ditimbulkan Astra. Pada 2019, aksi demo dilakukan Gerakan Rakyat Pembela Tanah Air (Gerapana). Demo tersebut sebagai protes terhadap tidak maksimalnya perusahaan dalam mengelola limbah berbahaya seperti aki bekas, selain itu pemasok utama timah hitam Astra yaitu PT

Non Ferindo Utama diketahui tidak memiliki IPAL dan AMDAL. Mengingat dampak yang ditimbulkan berbahaya bagi lingkungan, maka perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keberlanjutan. PT Astra International Tbk menyusun laporan keberlanjutan dan mendapat kategori *silver* dalam kegiatan ASRR 2020.

ASRR sebagai salah satu katrol dalam mengoptimalkan kualitas dan jumlah perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan. Standar GRI yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keberlanjutan serta acuan penilaian dalam ASRR dapat memenuhi tuntutan tercapainya SDGs, secara kuantitas perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan memang mengalami peningkatan, tapi dampak terhadap upaya tercapainya SDGs belum memadai (Moneva et al, 2006).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengambil judul “Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Mencapai *Sustainability Development Goals* (Studi Kasus Pada PT Perusahaan Gas Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk Periode 2019)”.

1.2 Identifikasi Masalah

identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan baik jasa maupun industri memberikan dampak terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial pada lingkungan sekitarnya.
2. Jumlah perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutan meningkat, tetapi kontribusi dalam mencapai SDGs (*Sustainability Development Goals*) belum merata.

3. Adanya standar GRI sebagai acuan dalam menyajikan laporan keberlanjutan membuat kualitas pelaporan mengalami pergeseran dari banyaknya informasi yang dilaporkan menjadi relevansi informasi yang disajikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan periode 2019 pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk berdasarkan standar GRI 2016?
2. Bagaimana kontribusi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk dalam mencapai SDGs?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk berdasar standar GRI dan kontribusinya pada SDGs 2030 mendatang.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan periode 2019 pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk berdasarkan standar GRI 2016.

2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk dalam mencapai SDGs.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan pengetahuan mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, serta pemahaman kajian teori secara nyata mengenai upaya yang dilakukan perusahaan guna terlaksananya tujuan SDGs yang telah ditetapkan pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan dengan memperhatikan tujuan SDGs dan item-item pengungkapan yang dianjurkan oleh GRI Standards.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Landasan Teori

Penggunaan teori pemangku kepentingan (*Stakeholders Theory*) serta teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) sering digunakan sebagai dasar penelitian terkait akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Rahayu (2019) menjelaskan bahwa kedua teori ini merupakan sebuah kebijakan dalam pengungkapan akuntansi yang menjadi pertimbangan atau strategi untuk melihat hubungan perusahaan dengan pihak lain saling berinteraksi, dengan kata lain teori

ini dianggap sebagai alasan perusahaan dalam mengungkap informasi mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk laporan tahunan seperti laporan keberlanjutan untuk mencapai SDGs, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder*.

Legitimasi perusahaan adalah keadaan dimana nilai sosial dan kegiatan operasi perusahaan selaras. Dasar dari teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Mathew (1993), mengemukakan bahwa kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat akan terbentuk, karena masyarakat dapat memberikan kekuatan hukum dan otoritas dalam penggunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan. Teori ini menitikberatkan hak public secara luas.

Konsep teori pemangku kepentingan memandang bahwa manajemen memiliki hubungan *fiduciary* tidak hanya dengan pemegang saham (stockholders) tetapi juga pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan berhak memperoleh informasi mengenai bagaimana perusahaan memberikan kesejahteraan, keselamatan dan keamanan terkait aspek lingkungan dan sosial.

1.6.2 Penelitian Terdahulu / Studi Empiris

Penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam penyusunan kerangka pemikiran serta mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diteliti diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Astini, Yuniarta dan Kurniawan (2017)	Analisis Penerapan GRI-G4 Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2013-2016	Secara keseluruhan peng-ungkapan terendah diungkapkan 10% pada aspek produk dan jasa. Sedangkan pengungkapan tertinggi terjadi pada aspek hubungan dengan pemangku kepentingan hingga mencapai 97,5%.
2	Rahayu (2019)	Analisis Konten dan Komparatif <i>Sustainability Report</i> Perbankan Berdasarkan GRI-G4	PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Malayan Banking Bhd (Maybank) telah menerapkan <i>Sustainability Report</i> dengan baik. Walaupun sudah baik, dalam laporan ditemukan ketidaktepatan dan ambiguitas pada salah satu indikator yang diungkapkan.
3	Nurfitriana (2020)	Implementasi <i>Sustainability Reporting</i> Pada Perusahaan Yang Termasuk Ke Dalam Indeks LQ45	Implementasi <i>sustainability report</i> dilihat dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan pada perusahaan LQ45 tergolong sedang.
4	Syahputra, Helmy, dan Mulyani (2019)	Analisis Pengungkapan Lingkungan Berdasarkan GRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengungkapan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan indikator yang lebih tinggi untuk PT Aneka Tambang, Tbk. dibandingkan dengan PT Vale Indonesia, Tbk. 2. Keluasan dan kedalaman pengungkapan laporan keberlanjutan PT Indo Tambangraya

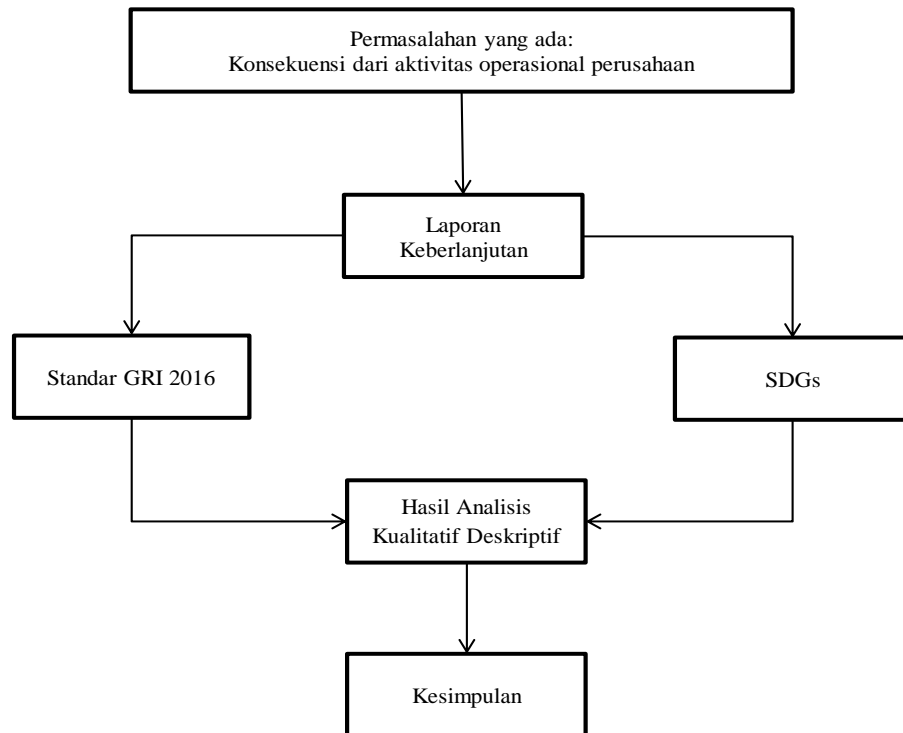
			Megah Tbk, lebih baik di bandingkan PT Bukit Asam (Persero), Tbk.
5	Gunawan, Permatasari, dan Tilt (2019)	<i>Sustainable Development Goal Disclosure: Do They Support Responsible Consumption and Production</i>	Perusahaan Indonesia cenderung lebih fokus pada SDGs terkait kota dan masyarakat yang berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta pendidikan berkualitas.
6	Anjani (2021)	Penerapan CSR dalam mendukung SDGs 2030	PT Pupuk Kujang sudah menerapkan 43% standar GRI 2016 berdasar laporan keberlanjutan ditahun 2019. Kinerja perusahaan memberikan kontribusi kepada SDGs di tahun 2017, 2018 dan 2019 secara berturut-turut 17,16%, 18,93% dan 27,81% menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun.
7	Rofelawaty (2014)	Analisis Praktik <i>Sustainability Reporting</i> Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI	Sebagian besar perusahaan industri di BEI belum sepenuhnya menerapkan laporan berkelanjutan. Item-item menurut <i>Sustainability Reporting Guidelines</i> yang seharusnya diungkapkan dan dikomunikasikan pada <i>stakeholders</i> masih belum diungkapkan dalam laporan. Kebanyakan perusahaan hanya mengungkapkan kinerja

			ekonomi dan kepedulian perusahaan akan masalah sosial dan lingkungan masih dalam bentuk informasi kualitatif atau narasi, tidak diikuti dengan perhitungan biaya atau informasi yang bersifat kuantitatif.
8	Rosati dan Faria (2019)	<i>Addressing the SDGs in sustainability report: The relationship with institutional factors</i>	Organisasi yang melaporkan SDGs lebih cenderung berlokasi di negara dengan tingkat kerentanan perubahan iklim yang lebih tinggi, tanggung jawab sosial perusahaan nasional, pengeluaran perusahaan untuk pendidikan tinggi, kesenangan dan individualisme, dan tingkat koordinasi pasar, pekerjaan yang lebih rendah, perlindungan, jarak daya dan orientasi jangka panjang.
9	Ramadani, Adelina (2019)	Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Berdasarkan Standar GRI	Pelaporan standar universal PGN tahun 2016 sebesar 59% dan 2017 sebesar 67%. Pelaporan standar topik spesifik memenuhi 28% pada tahun 2016 dan 37% pada tahun 2017.
10	Panjaitan dan Sukoharsono (2019)	Analisis Kinerja Sustainability yang Berkontribusi pada <i>SDGs</i>	PT Pupuk Kalimantan Timur telah menerapkan 42,24% standar GRI dengan kategori pengungkapan partially applied. Tahun 2015, 2016 dan 2017 secara berturut-turut berkontribusi pada <i>SDGs</i> 33,67%, 33,89% dan 40,77%.

1.6.3 Kerangka Konseptual

Rüdiger Hahn (2013) menyebutkan bahwa banyaknya stakeholders akan mendorong beragamnya tuntutan informasi untuk kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menentukan keberhasilan usaha. Laporan keberlanjutan merupakan sarana perusahaan memenuhi berbagai tuntutan stakeholders tersebut. Dalam penyusunannya laporan keuangan mengacu standar GRI. Bahkan standar GRI menjadi tolak ukur untuk menilai kualitas laporan keberlanjutan dalam ASRR yang diselenggarakan NCSR. Selain itu, SDGs menjadi bagian penting dalam pelaporan keberlanjutan. kontribusi yang dilakukan perusahaan terhadap tujuan SDGs menjadi hal yang diperhatikan stakeholders saat ini karena mampu mengkomunikasikan berbagai isu keberlanjutan usaha atau organisasi terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial dalam masyarakat bahkan dunia. SDGs juga menjadi salah satu kriteria yang wajib diungkap perusahaan peraih rating platinum dalam ASRR.

Penelitian ini berangkat dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan operasional perusahaan terhadap lingkungan seperti yang dilakukan Astra dan BRI. Untuk itu tidak heran jika dua perusahaan tersebut tidak bisa mendapat rating platinum dalam penilaian ASRR pada tahun 2020. Rating platinum diraih oleh PGN. Namun belum diketahui bagaimana tingkat pengungkapan standar GRI 2016 dan seberapa besar kontribusinya terhadap pencapaian tujuan SDGs. Oleh karena itu, peneliti menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. 1
Kerangka Konseptual

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada website NCSR (*National Center for Sustainability Reporting*) yang mempublikasikan laporan keberlanjutan periode 2019 peserta ASRR (*Asia Sustainability Reporting Rating*) tahun 2020. Penelitian dilakukan pada bulan November 2021 hingga April 2022.